

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. ke-2, Refika Aditama, Bandung.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ Koosmargono. 2008, *Memahami dan Mengerti HIR*, Badan, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hadjon, M. Philipus et.al., 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , dan Tatiek Sri Djamiati. 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun, BN., 2009, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perangin, Effendi. 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi ketiga*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wijk, HD Van and Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, Dikutip dari Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.N.H, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Pranedamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo. 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar grafika, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam, Intermedia, Jakarta.
- Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung.
- Yudara, N.G. 2006, *Pokok-pokok Kajian Bahasan di Seputar Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Otentik*, Prestasi Pustaka

Publisher, Jakarta.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah:

Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechtsvinding volume 1 nomor 1, April 2012.

Teuku Fahryanda Irsal, Skripsi: “*Fungsi dan kedudukan majelis pembina dan pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021).

Terry Maharani Wibowo, *Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT Dan PPATS*, Justitia Jurnal Hukum volume 2 No.2, Oktober 2018.

Ivan Stevanus Hagabean, *Tesis : “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan”* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016).

C. Internet:

Sovia Hasanah, *Cara Menghitung Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-jual-beli-tanah-cl229>) Diakses pada 12 Juni 2022, 14.10)

“Etika”. <https://kbbi.web.id/etika>. Diakses pada 10 Juni 2022.

“Tanggung Jawab”. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada 10 Juni 2022.

D. Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Kode Etik PPAT.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No. 2 tahun 2018 tentang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1997.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.